**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA: STUDI KUALITATIF TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI PEKON WAY PETAI, KECAMATAN SUMBER JAYA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DESI PUSPITASARI**

**NPM. 2416041100**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata. Hal ini karena desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat serta menjadi tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan demikian, pembangunan desa tidak dapat dipandang hanya sebagai sebuah program teknis semata, tetapi juga sebagai proses sosial yang mengutamakan keterlibatan masyarakat secara langsung. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum yang kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam hal menyusun perencanaan pembangunan. Aturan ini menegaskan bahwa masyarakat desa bukan sekadar penerima hasil pembangunan, melainkan aktor utama yang memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan pembangunan (Usman & Salahuddin, 2025). Selain itu, mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) diatur dalam *Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*, yang menegaskan bahwa masyarakat desa wajib dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi desa dalam mengelola Dana Desa agar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain menjadi bagian dari kebijakan nasional, arah pembangunan desa juga selaras dengan agenda pembangunan global yang tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam SDGs Desa, terdapat berbagai tujuan yang ingin dicapai, seperti pengentasan kemiskinan, kepedulian terhadap lingkungan, serta menciptakan tata kelola desa yang demokratis dan sejahtera. Cita-cita tersebut hanya bisa diwujudkan jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Salah satu forum penting yang menjadi wadah partisipasi masyarakat adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Forum ini bukan hanya sekadar tempat berkumpul, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan ide, mendiskusikan kebutuhan, serta menyusun prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi nyata di desa (Faozanudin et al., 2022)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak hanya dapat dimaknai sebatas kehadiran fisik dalam forum musyawarah. Lebih jauh, partisipasi mencakup keterlibatan aktif dalam menyampaikan gagasan, menentukan skala prioritas pembangunan, serta turut mengawasi jalannya pelaksanaan program. Dengan adanya ruang untuk berpartisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka secara langsung. Hal ini memungkinkan rencana pembangunan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Ketika partisipasi masyarakat terwujud secara bermakna, maka pelaksanaan program pembangunan desa berpotensi menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sebaliknya, apabila partisipasi hanya sekadar formalitas, pembangunan desa cenderung bersifat top-down dan berisiko tidak menyentuh permasalahan mendasar yang dialami warga.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan partisipasi masyarakat masih menghadapi banyak tantangan. Tidak jarang warga hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) hanya sebatas memenuhi undangan tanpa keterlibatan aktif dalam proses diskusi. Kondisi ini menyebabkan keputusan pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh perangkat desa atau tokoh tertentu yang memiliki otoritas lebih besar. Akibatnya, aspirasi masyarakat secara luas belum sepenuhnya terakomodasi dalam rencana pembangunan. Situasi semacam ini mencerminkan adanya jurang antara idealisme regulasi yang menekankan partisipasi, dengan realitas pelaksanaannya di lapangan yang masih terbatas.

Partisipasi masyarakat yang kurang optimal dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kendala yang muncul antara lain rendahnya kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya terlibat, minimnya pemahaman tentang mekanisme pembangunan desa, serta adanya budaya pasrah atau enggan untuk berbeda pendapat dengan tokoh elit. Sedangkan dari sisi eksternal, hambatan dapat berupa terbatasnya akses informasi pembangunan, dominasi elit desa dalam pengambilan keputusan, serta lemahnya praktik transparansi dan akuntabilitas. Faktor-faktor tersebut membuat partisipasi masyarakat sering kali hanya sebatas pada kontribusi teknis, misalnya dalam bentuk tenaga, material, atau sumbangan dana. Sementara itu, keterlibatan pada tahap strategis seperti pengambilan keputusan maupun evaluasi program pembangunan masih terbilang rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat perlu dilakukan melalui proses panjang dan berkesinambungan. Diperlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat, baik melalui pendidikan, sosialisasi, maupun pelatihan, agar warga memahami peran penting mereka dalam pembangunan. Selain itu, penciptaan ruang dialog yang lebih terbuka, partisipatif, dan inklusif juga harus menjadi prioritas, sehingga masyarakat merasa memiliki kesempatan yang setara dalam menyampaikan pandangan. Komitmen dari perangkat desa juga sangat dibutuhkan untuk memastikan masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan benar-benar sebagai subjek aktif yang berkontribusi dalam setiap tahap. Dengan cara ini, partisipasi dapat bertransformasi menjadi bagian integral dari proses pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong terwujudnya pembangunan desa yang lebih demokratis dan berkeadilan (Pakpahan et al., 2024).

Salah satu penelitian yang menyoroti fenomena ini adalah studi oleh (Poespitohadi & Florencia Ega, 2023)mengenai partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun kegiatan MusrenbangDes berjalan dengan baik, keterlibatan masyarakat masih belum maksimal. Banyak warga yang datang ke forum musyawarah hanya sebatas memenuhi undangan, tanpa sepenuhnya memahami apa yang sedang dibahas. Selain itu, sosialisasi mengenai Musrenbang juga belum merata sehingga tidak semua masyarakat mengetahui mekanismenya. Faktor-faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan, kesibukan warga, dan terbatasnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi penghambat utama. Temuan ini memperlihatkan bahwa kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah tidak otomatis mencerminkan partisipasi aktif yang diharapkan.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Akbar et al., 2018) di Desa Jatimulya, yang juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, yaitu kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepala desa telah berupaya mengajak masyarakat bermusyawarah dan memberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Namun, rendahnya tingkat pendidikan membuat sebagian besar warga kurang memahami proses perencanaan pembangunan dan cenderung menerima saja keputusan yang ditetapkan pemerintah desa. Komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat memang ada, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesadaran warga agar lebih aktif terlibat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa selain kepemimpinan yang visioner, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan agar partisipasi dalam pembangunan desa benar-benar berjalan secara partisipatif.

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian mutakhir oleh (Octaningrum et al., 2024) di Desa Pintareng. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih berada pada tingkat yang rendah. Rendahnya partisipasi ini terlihat dari minimnya kontribusi ide maupun keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran mereka, ditambah dengan sosialisasi dari pemerintah desa yang masih terbatas. Kondisi ini membuat banyak warga bersikap pasif, bahkan forum musyawarah seperti MusrenbangDes cenderung tidak diikuti secara aktif. Akibatnya, program pembangunan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan kualitas hasil pembangunan pun kurang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan mekanisme musyawarah agar lebih inklusif, serta pemberian insentif bagi warga yang berpartisipasi, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih relevan dan berkelanjutan.

Jika ditarik benang merah dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes masih menghadapi tantangan besar. Masyarakat memang sudah memiliki ruang untuk hadir, tetapi kehadiran itu sering kali belum diikuti dengan keterlibatan substansial dalam menyampaikan aspirasi atau menentukan prioritas pembangunan. Hambatan yang muncul baik dari faktor internal, seperti keterbatasan pengetahuan dan rendahnya kesadaran, maupun dari faktor eksternal, seperti dominasi elit desa dan lemahnya transparansi, menjadi penyebab rendahnya kualitas partisipasi. Meski demikian, penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya peluang. Dukungan kepemimpinan desa yang kuat serta penciptaan ruang dialog yang lebih terbuka dapat mendorong partisipasi masyarakat menjadi lebih bermakna.

Oleh karena itu, penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai, Kecamatan Sumber Jaya menjadi relevan untuk dilakukan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada desa-desa dengan konteks sosial tertentu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tambahan dalam memahami bagaimana partisipasi masyarakat terbentuk di tingkat lokal. Setiap desa memiliki kekhasan tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politiknya. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menambah pemahaman tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, khususnya di wilayah Lampung.

Pekon Way Petai adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Desa ini dikenal sebagai wilayah agraris karena sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas utama yang dihasilkan masyarakat antara lain kopi, padi, serta berbagai tanaman hortikultura yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, jumlah penduduk Pekon Way Petai mencapai sekitar 2.150 jiwa, dengan struktur sosial yang beragam dari segi budaya maupun etnis. Keberagaman ini memengaruhi pola interaksi sehari-hari masyarakat, termasuk dalam hal keterlibatan mereka pada kegiatan pembangunan desa. Di sisi lain, tradisi gotong royong yang masih kuat serta ikatan sosial yang erat antarwarga menjadi modal sosial penting bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam forum-forum pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes).

Seperti desa-desa lain di Indonesia, Pekon Way Petai juga menerima alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, baik berupa pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini membuat desa memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Perencanaan ini diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Oleh karena itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) menjadi forum penting yang harus dijalankan dengan serius agar masyarakat benar-benar dapat berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan.

Dalam praktiknya, MusrenbangDes di Pekon Way Petai rutin dilaksanakan setiap tahun dan dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok warga. Secara ideal, forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan usulan program, maupun mengkritisi pembangunan yang sudah berjalan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan tersendiri. Menurut laporan pemerintah desa tahun 2023, tingkat kehadiran masyarakat dalam MusrenbangDes mencapai sekitar 65% dari jumlah undangan yang disebarkan, tetapi partisipasi aktif dalam bentuk penyampaian gagasan masih relatif rendah. Banyak warga hadir sebatas memenuhi undangan tanpa berani atau terbiasa mengemukakan pendapat. Kondisi ini membuat diskusi berjalan kurang maksimal dan keputusan pembangunan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa atau tokoh tertentu yang memiliki otoritas lebih besar.

Ada beberapa faktor yang membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa belum optimal. Dari sisi internal, sebagian warga belum memahami mekanisme MusrenbangDes sehingga cenderung pasif dan menyerahkan keputusan kepada perangkat desa. Dominasi tokoh tertentu dalam forum musyawarah juga membuat usulan dari masyarakat luas tidak selalu terakomodasi. Dari sisi eksternal, keterbatasan akses informasi dan kurangnya transparansi dalam proses perencanaan menjadi kendala tersendiri. Temuan (Akbar et al., 2018) menguatkan kondisi ini dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. Jika ditarik lebih jauh, kepemimpinan dan komunikasi dapat dipahami sebagai faktor eksternal yang datang dari pemerintah desa, sedangkan pendidikan mencerminkan faktor internal yang melekat pada masyarakat. Dengan demikian, kualitas partisipasi warga tidak hanya ditentukan oleh dorongan dari aparat desa, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat dalam memahami dan merespons proses pembangunan.

Meskipun demikian, masyarakat Pekon Way Petai sebenarnya memiliki potensi besar untuk terlibat lebih aktif. Tradisi gotong royong yang masih kuat serta ikatan sosial yang erat antarwarga dapat menjadi modal sosial penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi. Misalnya, kebiasaan warga untuk saling membantu dalam kegiatan pertanian atau pembangunan fasilitas umum bisa diarahkan menjadi bentuk partisipasi dalam forum MusrenbangDes. Modal sosial ini dapat diperkuat apabila pemerintah desa mampu membuka ruang dialog yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.

Melihat kondisi tersebut, penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai menjadi penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat partisipasi. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang dinamika partisipasi masyarakat di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi pemberdayaan masyarakat agar pembangunan desa berjalan lebih demokratis, transparan, dan inklusif. Pada akhirnya, pembangunan yang melibatkan masyarakat secara penuh akan lebih berkelanjutan serta sejalan dengan cita-cita Sustainable Development Goals (Pakpahan et al., 2024).

Berdasarkan uraian teoritis maupun penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes merupakan isu penting yang banyak diperbincangkan dalam literatur administrasi publik maupun pembangunan desa. Forum MusrenbangDes pada dasarnya dimaksudkan sebagai ruang demokratis di tingkat desa, di mana masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan ide, menentukan prioritas pembangunan, sekaligus mengawasi jalannya pelaksanaan program. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan harapan normatif tersebut. Partisipasi masyarakat masih sering dipahami secara sempit, hanya sebatas hadir dalam forum tanpa keterlibatan bermakna dalam proses perumusan keputusan. Hambatan berupa rendahnya pemahaman warga, dominasi elit desa, serta lemahnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas menjadi tantangan serius yang berulang kali muncul dalam berbagai konteks desa di Indonesia.

Temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya di beberapa wilayah. Misalnya, penelitian Poespitohadi menekankan bahwa hambatan komunikasi dan dominasi tokoh lokal menyebabkan suara masyarakat biasa sulit terdengar. Sementara itu, penelitian Akbar dkk. menyoroti lemahnya pemahaman warga terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, sehingga keputusan akhir cenderung diserahkan kepada aparat desa. Di sisi lain, penelitian Octaningrum dkk. menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial serta budaya lokal. Dari sini tampak bahwa meskipun jumlah penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes sudah cukup banyak, mayoritas studi masih terfokus pada desa-desa tertentu. Artinya, masih terdapat ruang yang cukup luas untuk mengkaji dinamika partisipasi di desa lain dengan karakteristik berbeda, agar gambaran empiris mengenai fenomena ini semakin beragam dan komprehensif.

Keterbatasan inilah yang menjadi dasar lahirnya gap penelitian. Setiap penelitian sebelumnya memang memberikan gambaran penting, tetapi konteks sosial, politik, dan budaya yang beragam membuat hasilnya tidak bisa digeneralisasi begitu saja. Apa yang berlaku di satu desa, belum tentu berlaku di desa lain dengan struktur sosial yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kajian baru yang lebih kontekstual untuk menjawab celah penelitian tersebut. Dalam konteks inilah, penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai, Kecamatan Sumber Jaya, menjadi relevan sekaligus penting.

Way Petai merupakan salah satu desa dengan potensi agraris yang kuat, ditopang oleh sumber daya alam dan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong. Modal sosial ini seharusnya menjadi fondasi bagi tumbuhnya partisipasi aktif dalam forum perencanaan pembangunan. Namun demikian, potensi tersebut tidak otomatis berkonversi menjadi partisipasi bermakna. Apakah budaya gotong royong dan kedekatan sosial benar-benar mendorong keterlibatan aktif dalam MusrenbangDes? Ataukah justru masih terdapat kendala serupa dengan desa-desa lain, seperti dominasi elit atau rendahnya kesadaran kritis warga? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadikan penelitian ini penting dilakukan, terlebih karena hingga saat ini kajian akademik yang menyoroti secara spesifik partisipasi masyarakat di Pekon Way Petai masih sangat terbatas.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs Desa. Salah satu tujuan penting dari SDGs adalah membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, transparan, dan berkeadilan. Tanpa keterlibatan masyarakat secara bermakna, pencapaian target tersebut akan sulit diwujudkan. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) tahun 2023 menunjukkan bahwa dari lebih dari 62.000 desa di Indonesia, hanya sekitar 40% MusrenbangDes yang dinilai berjalan partisipatif sesuai indikator SDGs Desa. Angka ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan besar antara idealisme regulasi dengan implementasi di lapangan, termasuk di Pekon Way Petai. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ganda. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes, khususnya di konteks desa dengan karakteristik sosial yang khas seperti Way Petai. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat dalam memperbaiki kualitas MusrenbangDes agar lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan nyata warga.

Dengan begitu, penelitian ini bukan hanya relevan untuk menjawab celah akademis, tetapi juga penting untuk mendukung upaya pembangunan desa yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman baru tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat diperkuat, serta strategi apa yang dapat ditempuh agar MusrenbangDes benar-benar menjadi wadah partisipatif, bukan sekadar formalitas administratif.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai, Kecamatan Sumber Jaya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai?
3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai?
	1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai, Kecamatan Sumber Jaya.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai.
3. Untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes di Pekon Way Petai.
	1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Selama ini, diskursus tentang pembangunan desa lebih banyak menekankan pada aspek kebijakan dan regulasi, sementara aspek partisipasi masyarakat sering kali belum dikaji secara mendalam dalam konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur dengan menghadirkan gambaran empiris mengenai dinamika MusrenbangDes di Pekon Way Petai.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dalam perkuliahan maupun kajian akademis lain yang membahas tentang pembangunan partisipatif, demokrasi lokal, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mahasiswa, peneliti, maupun akademisi lainnya memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya partisipasi sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan MusrenbangDes, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Pemerintah desa dapat menjadikan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk memperbaiki strategi komunikasi, memperluas sosialisasi, serta menciptakan forum musyawarah yang lebih terbuka, inklusif, dan demokratis. Dengan demikian, MusrenbangDes tidak hanya menjadi agenda rutin administratif, melainkan juga forum substantif yang benar-benar menyerap aspirasi warga.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan desa. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung partisipasi, masyarakat dapat lebih memahami peran strategis mereka dalam menentukan arah pembangunan. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap kritis, rasa memiliki, serta tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih adil dan merata.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan atau bahan perbandingan untuk kajian serupa di masa mendatang. Hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami fenomena di Pekon Way Petai, tetapi juga dapat menjadi inspirasi untuk mengkaji fenomena yang sama di desa lain dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memperluas cakrawala pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akbar, Muh. F., Suprapto, S., & Surati. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan  di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*.

Faozanudin, M., Sri Sulistiani, L., Tri Harsanto, B., Wanusmawatie, I., Sukarso, Paramarti Dasuki, N., Satwika Wijaya, S., Nuraini, H., Wahyuningrat, Indiahono, D., Simin, Gunarto, G., Antono, A., Noviko, S., Kurniasih, D., Israwan Setyoko, P., Retna Puspita, D., Tobirin, Safrida, … Mudis Taruna, M. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Dialetika Partisipasi Publik Dan Pembangunan*. SIP Publishing.

Octaningrum, A., Zuniati, A. R., Aulia, H. N., & Nurdin. (2024). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pintareng, Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *6*(1). https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.228

Pakpahan, H. T., Kurniasih, S., Heryadi, D. Y., Fauziah, A., Eka Bumandava, A. P., Tahir, M. I., Andayani, Q., Fachri, A., Sumartono, E., & Ketut Budaraga, I. (2024). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Heipublishing. www.HeiPublishing.id

Poespitohadi, W., & Florencia Ega, T. F. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa. *MBI: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*.

Usman, B., & Salahuddin. (2025). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. https://www.researchgate.net/publication/389922810